



DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024



Alamat : Jl. Diponegoro No. 15 Kudus
Telp (0291) 438152, Faks (0291) 435030
Email : dinkes@kuduskab.go.id
Website : dinkes.kuduskab.go.id

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2024**

**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KUDUS**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat Ridho dan perkenan-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dapat disusun dan selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis selama tahun anggaran 2024. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP Tahun 2024 ini. Kami menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan LKIP tahun 2024 ini, untuk itu saran dan masukan kami harapkan untuk perbaikan penyusunan LKjIP di tahun yang akan datang.

Kudus, 20 Januari 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN



dr. ANDINI ARIDEWI, M.Kes
Pembina Tk. I

NIP. 19731008 200501 2 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Gambaran Umum Perangkat Daerah	3
1.4 Permasalahan Utama	12
1.5 Cascading Renstra.....	12
1.6 Tindak Lanjut Atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun Sebelumnya	29
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	31
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator	31
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	33
2.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024	35
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	47
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	49
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024	49
3.2 Analisis Capaian Kinerja	51
3.3 Efisiensi Anggaran.....	69
3.3 Inovasi dan Penghargaan.....	84
BAB IV PENUTUP.....	87
4.1 Kesimpulan	87
4.2 Langkah Perbaikan Kinerja	88
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus merupakan tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan program kebijakan dan pengembangan kesehatan masyarakat di Kabupaten Kudus. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2024, dengan tujuan:

1. mengetahui capaian kinerja Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2024;
2. sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus untuk meningkatkan kinerjanya;
3. sebagai media dalam upaya menyempurnakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuju pemerintahan yang bersih (*clean government*), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
6. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023;
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 23).

1.3 Gambaran Umum Dinas Kesehatan

a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

1) Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus adalah Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) Sekretariat, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian;
- b. 3 (tiga) Bidang dan masing-masing bidang sebanyak 3 (tiga) subkoordinator.

Selain itu terdapat UPTD berupa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebanyak 19 UPTD Puskesmas dan 1 (satu) UPTD Laboratorium Kesehatan sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

2) Tugas Pokok

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang kesehatan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

3) Fungsi

Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan Pengendalian Penyakit, Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
- b) Penetapan kebijakan teknis di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan Pengendalian Penyakit, Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
- c) Pengkoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan Pengendalian Penyakit, Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
- d) Penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan Pengendalian Penyakit, Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;

- e) Pengendalian dan pelaporan di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan Pengendalian Penyakit, Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
- f) Penyelenggaraan administrasi dinas di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan Pengendalian Penyakit, Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
- g) Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan dinas;
- h) Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- i) Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

1) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perencanaan program dan kegiatan, perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, umum, kepegawaian dan keuangan di lingkungan dinas. Sekretariat terdiri dari :

- a) Subbag Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
- b) Subbag Umum dan Kepegawaian

Adapun fungsi dari bagian sekretariat adalah :

- a) Perumusan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat dan Dinas;
- b) Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- c) Pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
- d) Pengelolaan organisasi dan tata laksana Dinas.
- e) Pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas.

2) Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perencanaan program dan kegiatan, perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, pembinaan dan

pengendalian kegiatan teknis di bidang pelayanan kesehatan masyarakat meliputi gizi masyarakat dan kesehatan keluarga, promosi dan pemberdayaan masyarakat dan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Olah Raga dan Kesehatan Kerja. Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat terdiri dari :

- a) Sub koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi
- b) Sub koordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
- c) Sub koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Olahraga dan Kesehatan Kerja.

Adapun fungsi dari bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat adalah :

- a) Perumusan perencanaan program dan kegiatan Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
- b) Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan masyarakat;
- c) Pengkoordinasian tugas di bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
- d) Pembinaan, fasilitas dan pelaksanaan kegiatan di bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat; dan
- e) Pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

3) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Tugas pokok Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit adalah melaksanakan sebagian fungsi kepala Dinas dalam menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan, perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan melaksanakan kegiatan di bidang Pengendalian penyakit meliputi pengendalian penyakit menular, pencegahan penyakit dan penanggulangan kejadian luar biasa, surveylan dan Imunisasi serta Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

Bidang Pengendalian Penyakit terdiri dari :

- a) Sub koordinator surveillance dan Imunisasi
- b) Sub koordinator Pengendalian Penyakit Menular
- c) Sub koordinator Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

Adapun fungsi bidang Pengendalian Penyakit adalah :

- a) Perumusan perencanaan program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

- b) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit;
- c) Pengkoordinasian tugas di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- d) Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan;
- e) Pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

4) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi kepala Dinas dalam menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan, perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan pengendalian kegiatan di bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan meliputi perijinan, sertifikasi, farmasi, perbekalan kesehatan, manajemen informasi, dan pengembangan kesehatan serta Pelayanan dan pembiayaan kesehatan.

Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan terdiri dari:

- a) Sub koordinator Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan;
- b) Sub koordinator Perbekalan dan Alat Kesehatan; dan
- c) Sub koordinator SDK, Perijinan, Sertifikasi dan Manajemen Informatika.

Adapun fungsi Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan adalah :

- a) Perumusan perencanaan program dan kegiatan di bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.
- b) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
- c) Pengkoordinasian tugas di bidang Pelayanan dan Sumber Daya kesehatan;
- d) Pembinaan, fasilitasi dan Pelaksanaan kegiatan di bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan; dan
- e) Pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.

5) Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Dinas

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada lingkup Dinas Kesehatan ada dua (2) yaitu:

- a) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Keudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas merupakan unsur pelaksana tugas teknis Dinas Kesehatan di bidang pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan. Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. UPTD Puskesmas di Kabupaten Kudus berjumlah 19 UPTD yang tersebar di sembilan (9) kecamatan.

b) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan

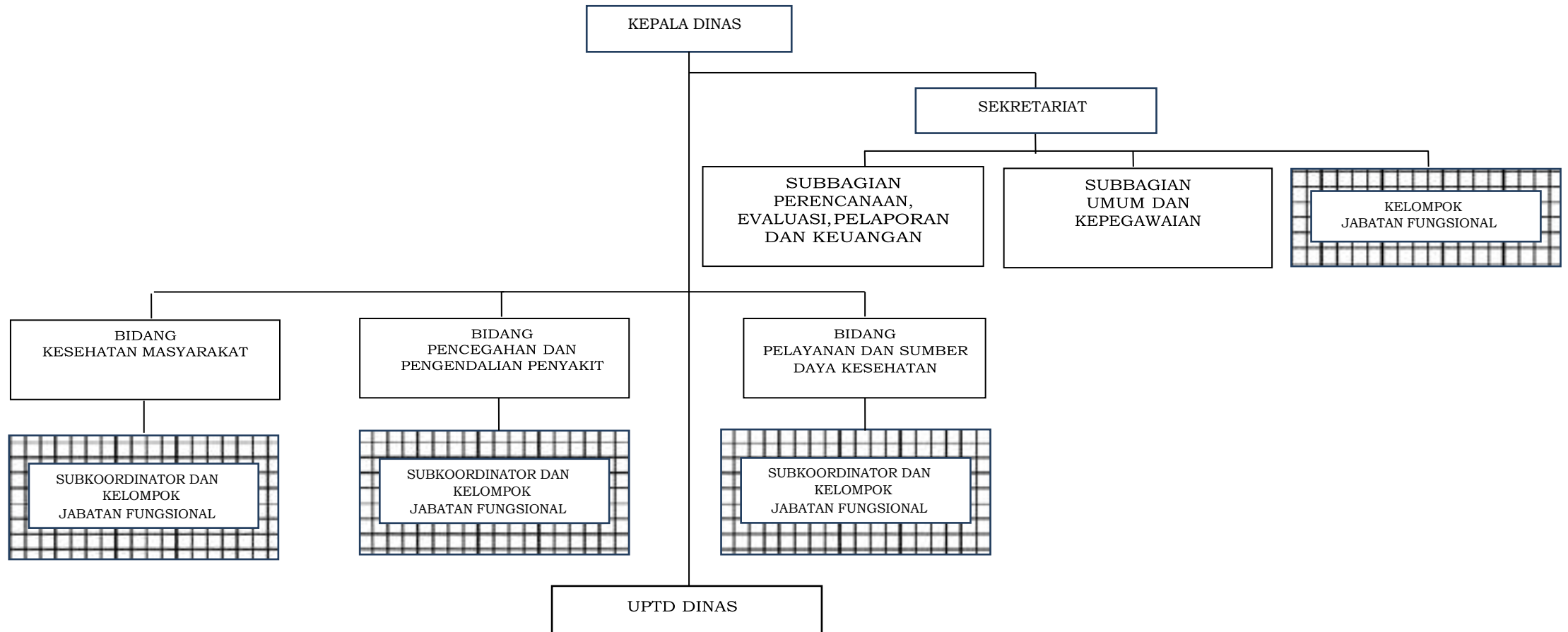
Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus bahwa UPTD Laboratorium Kesehatan merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan. UPTD Laboratorium Kesehatan dipimpin oleh Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

6) Kelompok Jabatan Fungsional

- a) Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya; dan
- c) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan/atau Subkoordinator sesuai bidang tugasnya.

Adapun bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus sebagaimana dalam gambar 1.1 di bawah ini:

Gambar 1.1
 Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus



c. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus sebanyak 1.282 orang sebagai berikut:

- 1) Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dan UPT Labkesda sejumlah 77 orang pegawai terdiri dari 72 PNS dan 5 PPPK;
- 2) UPTD Puskesmas sejumlah 708 orang pegawai terdiri dari 574 PNS dan 134 PPPK.

Adapun rincian jumlah pegawai pada Dinas Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Sumber Daya Manusia di Dinas Kesehatan
Tahun 2024

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Kepala Dinas	1 Orang
2.	Sekretariat	
	a. Sekretaris Dinas	1 Orang
	b. Subbag Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan	8 Orang
	c. Subbag Umum dan Kepegawaian	6 Orang
3.	Bidang Kesehatan Masyarakat	
	a. Kepala Bidang	1 Orang
	b. Sub koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi	7 Orang
	c. Sub koordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	6 Orang
	d. Sub koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Olah Raga dan Kesehatan Kerja	4 Orang
4.	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
	a. Kepala Bidang	1 Orang
	b. Sub koordinator Surveillance dan Imunisasi	6 Orang
	c. Sub koordinator Pengendalian Penyakit Menular	5 Orang
	d. Sub koordinator Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	3 Orang
5.	Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	
	a. Kepala Bidang	1 Orang
	b. Sub koordinator Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan	6 Orang
	c. Sub koordinator Perbekalan dan Alat Kesehatan	9 Orang
	d. Sub koordinator SDK, Perijinan, Sertifikasi dan Manajemen Informatika	5 Orang

d. Sarana dan Prasarana

Salah satu fokus Dinas Kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di Kabupaten Kudus adalah menyelenggarakan upaya penyediaan fasilitas kesehatan yang optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kudus. Hal tersebut diupayakan dengan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, penyediaan obat dan perbekalan kesehatan serta penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.

Berdasarkan jenis fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, di Kabupaten Kudus terdapat 293 fasilitas kesehatan yang sudah terdata, sebagaimana tabel 1.2. berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Institusi Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Kudus Tahun 2024

No	Jenis Fasyankes/Unit Kerja	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	1
2	Puskesmas	19
3	Rumah Sakit	10
4	Klinik	50
5	Sarana Kefarmasian dan Alat Kesehatan	
	a. Apotik	110
	b. PBF	3
6	Laboratorium Kesehatan	6
7	Unit Transfusi Darah	1
8	Praktek Mandiri Tenaga Kesehatan	
	a. Dokter	55
	b. Dokter Gigi	11
	c. Dokter Spesialis	3
	d. Bidan	22
	e. Perawat	1
	f. Perawat Gigi	1
JUMLAH		293

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus memiliki 19 UPTD Puskesmas yaitu 10 Puskesmas Rawat Inap dan 9 Puskesmas Non Rawat Inap yang tersebar di 9 kecamatan. Adapun data Puskesmas sebagai berikut pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.3
Data Puskesmas di Kabupaten Kudus Tahun 2024

No	Kecamatan	Nama Fasyankes	Jenis	Tingkatan
1	Kaliwungu	Kaliwungu	Perkotaan	Rawat Inap
		Sidorekso	Perkotaan	Rawat Inap
2	Kota	Purwosari	Perkotaan	Non Rawat Inap

No	Kecamatan	Nama Fasyankes	Jenis	Tingkatan
		Wergu Wetan	Perkotaan	Non Rawat Inap
		Rendeng	Perkotaan	Non Rawat Inap
3	Jati	Jati	Perkotaan	Non Rawat Inap
		Ngembal Kulon	Perkotaan	Non Rawat Inap
4	Undaan	Undaan	Perkotaan	Rawat Inap
		Ngemplak	Perkotaan	Non Rawat Inap
5	Mejobo	Mejobo	Perkotaan	Rawat Inap
		Jepang	Perkotaan	Rawat Inap
6	Jekulo	Jekulo	Perkotaan	Rawat Inap
		Tanjungrejo	Perkotaan	Rawat Inap
7	Bae	Bae	Perkotaan	Non Rawat Inap
		Dersalam	Perkotaan	Non Rawat Inap
8	Gebog	Gribig	Perkotaan	Rawat Inap
		Gondosari	Perkotaan	Rawat Inap
9	Dawe	Dawe	Perkotaan	Rawat Inap
		Rejosari	Perkotaan	Rawat Inap

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus

Sedangkan jumlah Rumah Sakit Umum di Kabupaten Kudus baik milik Pemerintah dan swasta berjumlah 11 Rumah Sakit, terdiri dari 8 rumah sakit umum dan 3 rumah sakit khusus ibu dan anak. Data jenis dan tingkatan rumah sakit di Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel 1.5 berikut :

Tabel 1.4
Rumah Sakit di Kabupaten Kudus Tahun 2024

No	Nama Fasyankes	Jenis	Kelas	Penyelenggara
1	RSUD dr.Loekmono Hadi	RSU	B	Pemkab.
2	RS. Mardi Rahayu	RSU	B	Swasta
3	RSI Sunan Kudus	RSU	C	Swasta
4	RS. Kumala Siwi Mijen	RSU	D	Swasta
5	RS. Aisyiyah	RSU	D	Swasta
6	RS. Nurussyifa	RSU	D	Swasta
7	RS.Kartika Husada/Rumkitban	RSU	D	TNI
8	RS Sarkies	RSU	D	Swasta
9	RSIA Permata Hati	RSIA	C	Swasta
10	RSIA Harapan Bunda	RSIA	C	Swasta
11	RSIA Miriam	RSIA	C	Swasta

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus

e. Pembiayaan Kesehatan

Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Renstra, yang berdasar APBD Pemerintah Kabupaten Kudus, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.5.

Anggaran Pembiayaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2022 - 2024

No.	Tahun	Jumlah Anggaran
1.	2022	Rp. 116.324.202.545,00
2.	2023	Rp. 178.049.943.232,00
3.	2024	Rp. 222.768.428.591,00

Tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan anggaran pembiayaan kesehatan yang signifikan, diantaranya karena adanya meningkatnya dukungan anggaran dari sumber dana Dana Alokasi Umum (DAU) earmark untuk urusan kesehatan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

1.4 Permasalahan Utama

Adapun permasalahan yang dihadapi pada pencapaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Masih ada kematian ibu sebanyak 4 kasus;
2. Masih ada kematian bayi sebanyak 83 kasus;
3. Masih adanya balita stunting sebanyak 3,77%;
4. Belum tercapainya 100% Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, terutama cakupan pelayanan penyakit tidak menular;
5. Indeks Keluarga Sehat (IKS) masih dalam kategori keluarga pra sehat.

Beberapa isu strategis yang berdampak pada penyelenggaraan layanan kesehatan di Kabupaten Kudus Tahun 2024, diantaranya:

1. Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI);
2. Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB);
3. Penurunan prevalensi balita stunting;
4. Peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; dan
5. Peningkatan jumlah keluarga sehat.

1.5 Cascading Rencana Strategis

Cascading renstra berisi tentang tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, beserta indikatornya yang mengacu pada Cascading Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026. Adapun cascading renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.6.

Cascading Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Optimalisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas
					Mendukung pembangunan dan pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan berikut ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya
			Angka Kematian Bayi (AKB)		Meningkatkan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu					Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan
					Meningkatkan standarisasi mutu pelayanan kesehatan					Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan
			Angka Kematian Balita (AKBa)		Meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional					Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
				Peningkatan status kesehatan keluarga	Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan ibu maternal dan neonatal					Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar
			Indeks Keluarga Sehat (IKS)		Meningkatkan pelayanan kesehatan anak balita				Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan
					Mempercepat penurunan dan penanganan balita stunting dan gizi buruk					Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan
					Meningkatkan pelayanan gizi masyarakat		Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
					Meningkatkan pelayanan kesehatan pada usia produktif dan usia lansia		Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan		Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
					Meningkatkan pelayanan kesehatan lingkungan dan		Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan		Cakupan kunjungan bayi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
					menyelenggarakan kabupaten sehat						Kesehatan Sesuai Standar
					Meningkatkan pengelolaan kesehatan lingkungan, kerja dan olahraga		Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan		Cakupan balita ditimbang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
					Memperkuat pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)		Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan		Cakupan penjarangan pada usia pendidikan dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai
				Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit	Meningkatkan upaya penemuan dan penanganan penyakit menular		Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		Persentase Puskesmas yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
					Meningkatkan deteksi dini dan pengendalian penyakit tidak menular dan Kesehatan jiwa		Persentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan		Persentase puskesmas dengan pelayanan kesehatan yang ramah bagi lanjut usia	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
					Memperkuat sistem surveilans, kewaspadaan dini dan respon cepatterhadap penyakit yang berpotensi menyebabkan wabah/ Kejadian Luar Biasa (KLB), bencana dan krisis		Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan		Persentase penderita hipertensi berobat secara teratur	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
					Meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap		Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan		Cakupan penemuan dan pengobatan penderita Diabetes melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
				Pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat	Mendorong partisipasi aktif masyarakat, swasta dan lintas sektor dalam kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)		Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan		Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
					Meningkatkan upaya promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih sehat					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
				Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan						
					Mendorong pengembangan kualitas dan kompetensi SDM Kesehatan		Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar
				Pemenuhan sediaanfarmasi, perbekalan kesehatan, alat kesehatan dan makanan minuman	Memenuhi ketersediaan obat-obatan termasuk vaksin dan perbekalan kesehatan					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang yang positif Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar
					Meningkatkan pembinaan sarana pelayanan kefarmasian, toko alat kesehatan, optikal dan UMOT		Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)		Persentase cakupan penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA on ART)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar
					Meningkatkan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	Jumlah Orang yang Positif Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
							Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan		Prevalensi Balita Gizi Buruk	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
										Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
							Persentase Desa/ Kelurahan STBM		Persentase sarana air minum yang diawasi/ diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
										Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
										Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
							Persentase fasyankes yang melakukan respons KLB/ wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tatalaksana kasus)		Persentase puskesmas dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
										Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah kelompok Orang dengan risiko Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar
									Persentase kejadian luar biasa (KLB) di desa/ kelurahan ditangulangi <24 jam	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar
										Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan
										Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
										Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan
									Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
											dan Pemberian Obat Massal)
									Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas
										Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
										Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
							Persentase rumah sakit rujukan yang terakreditasi minimal strata utama		Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
									Persentase Fasyankes yang memiliki sertifikat akreditasi yang masih berlaku	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
								Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase puskesmas dan rumah sakit yang melaporkan data dan sistem informasi kesehatan	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
										Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan
								Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi persyaratan perizinan	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan
										Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
						PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuai standar	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
										Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)
										Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
								Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terpenuhi standar kompetensinya	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya
						PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman yang sesuai standar	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) sesuai dengan standar	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
								Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Industri Rumah Tangga yang terdata telah memiliki rekomendasi produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
								Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase penyedia Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang terdata dengan rekomendasi Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
								Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase penyedia makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang terdata dan dilakukan pembinaan	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
								Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase produk makanan dan minuman PIRT yang diperiksa dan memenuhi syarat keamanan pangan	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga Aktif	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa/ Kelurahan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
								Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rumah tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
								Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu aktif	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Terwujudnya tatakelola Perangkat Daerah yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Optimalisasi pengelolaan sumberdaya di tingkat Perangkat Daerah	Optimalisasi Pengelolaan SDM berorientasi merit sistem	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian kinerja subkegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Optimalisasi Pengelolaan sarana prasarana sesuai standar manajemen aset					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Optimalisasi Pengelolaan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
					Optimalisasi Pelaksanaan monitoring evaluasi dan kerja terstandar					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
										Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
										Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
										Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi

Sumber: Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026

1.6. Tindak Lanjut Atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2024

Tabel 1.7.
Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2024

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Melakukan perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja berdasarkan hasil analisis perbaikan kinerja/rekomendasi evaluasi capaian kinerja sebelumnya	Melakukan Analisis kinerja untuk perbaikan atau penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja: - RENJA 2025 - Perjanjian Kinerja Perubahan 2024 - Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2024 - GAP Sub Kegiatan 2025
2	Melakukan penyesuaian rencana aksi kinerja berdasarkan rekomendasi hasil pemantauan dan pengendalian secara berkala atas kinerja yang tidak sesuai dengan target untuk disepakati bersama oleh pemberi rekomendasi dan penerima rekomendasi melalui dialog kinerja	Penyesuaian rencana aksi kinerja atas kinerja yang tidak sesuai pada Realisasi Rencana Aksi ASN (<i>e-planning</i>)
3	Melakukan reviu berjenjang terhadap dokumen laporan akuntabilitas kinerja dan menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level kabupaten/provinsi/nasional (benchmark kinerja) dalam laporan akuntabilitas kinerja secara memadai	LKjIP Tahun 2023: - Sependapat, dalam penyusunan dokumen LKjIP akan disertakan reviu/koreksi dari atasan langsung yaitu Kasubbag, Sekdin dan Kadin di tahun berikutnya. Untuk LKjIP tahun 2023 sudah ada reviu hasil desk dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 15 Februari 2024; - Untuk informasi perbandingan realisasi kinerja di level provinsi/nasional sudah dicantumkan secara narasi di penjelasan setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) LKjIP tahun 2023 halaman 31
	Memastikan laporan akuntabilitas kinerja telah dimanfaatkan dalam penentuan besaran anggaran dan penyesuaian strategi pelaksanaan program/kegiatan dalam upaya mencapai target kinerja	Sudah terdapat alokasi anggaran untuk setiap sasaran strategis berdasarkan program kegiatan di LKjIP tahun 2023 halaman 21
	Berkomitmen dalam memanfaatkan laporan akuntabilitas kinerja sebagai pedoman untuk mendorong perbaikan dan penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	Komitmen bersama dalam memanfaatkan laporan akuntabilitas kinerja sebagai pedoman untuk mendorong perbaikan dan penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya
	Melakukan pemantauan atas tindaklanjut hasil evaluasi AKIP secara berkala (triwulan) dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP	Telah disusun SK Kadinkes tentang Tim Tindaklanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dan dilaksanakan koordinasi dalam pemenuhan perbaikkan data dukung AKIP Rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP sedang berproses pada penyusunan rekapitulasi pemantauan tindaklanjut AKIP tahun 2024 berdasarkan dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat Daerah Kab. Kudus

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Berkomitmen dalam memanfaatkan hasil evaluasi AKIP sebagai pedoman untuk meningkatkan capaian nilai efisiensi dan efektivitas kinerja program dan kegiatan serta capaian kinerja <i>output</i> dan <i>outcome</i>	Terdapat analisis atas efisiensi capaian kinerja tahun 2023 di LKjIP 2023 halaman 55-56, dimana tingkat efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja a tahun 2023 mencapai 12,97 %, meningkat sebesar 1,2 % dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 21,77 %. Hal ini didukung dengan adanya program kegiatan dan sub kegiatan yang saling menunjang antar Bidang dan Seksi untuk tercapainya kinerja organisasi yang meliputi Indikator Kinerja Utama sesuai visi, misi serta peran fungsi organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja berisi informasi utuh mulai dari tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, beserta indikatornya yang tertuang dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. Renstra merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus merupakan manifestasi komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dalam mendukung tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Kudus. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya.

Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 14).

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator

Kondisi yang akan dicapai Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dalam bentuk tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. Tujuan, sasaran dan indikator Renstra Dinas Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUNAN				Target Akhir Renstra
					2023	2024	2025	2026	
1	Tujuan: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	Nilai	0,6827	0,6830	0,6832	0,6834	0,6836	0,6836
	Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 Kelahiran Hidup	88,24	80,89	80,58	80,27	80,00	80,00
		Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 Kelahiran Hidup	7,7	7,7	7,70	7,50	7,00	7,00

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUNAN				Target Akhir Renstra
					2023	2024	2025	2026	
		Angka Kematian Balita (AKBa)	per 1.000 Kelahiran Hidup	9,1	8,63	8,41	8,19	7,50	7,50
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Nilai	0,35	0,35	0,40	0,45	0,50	0,50
2	Tujuan: Terwujudnya tatakelola Perangkat Daerah yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	33,29	33,45	33,55	33,75	33,75	33,75
	Sasaran: Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	91,93	92,43	92,93	93,43	93,93	93,93

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun sampai lima tahunan. Dinas Kesehatan mempunyai tujuan yang akan dicapai selama periode Renstra 2024-2026 yaitu “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat” dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM). Sedangkan sasarannya adalah meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan, dengan indikator: Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBa), dan Indeks Keluarga Sehat (IKS). Secara lebih detail, berikut definisi operasional pada masing-masing indikator tujuan dan indikator sasaran.

Tabel 2.2
Definisi Operasional Indikator Tujuan dan Sasaran
Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Sumber
Tujuan: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	Rata-rata nilai indeks dari indikator komposit yang mencakup 30 indikator yang dikelompokkan menjadi tujuh sub indeks atau kelompok indikator berdasarkan topik bidang kesehatan yaitu: kesehatan balita, kesehatan reproduksi, pelayanan kesehatan, perilaku kesehatan, penyakit tidak menular, penyakit menular dan kesehatan lingkungan;	Renstra Dinas Kesehatan 2024-2026
Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	Jumlah kasus kematian ibu baik disebabkan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan	Renstra Dinas Kesehatan 2024-2026

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Sumber
	Angka Kematian Bayi (AKB)	Jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama	Renstra Dinas Kesehatan 2024-2026
	Angka Kematian Balita (AKBa)	Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun (0-59 bulan) pada tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun yang sama (termasuk kematian bayi);	Renstra Dinas Kesehatan 2024-2026
	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Capaian angka perhitungan dari kedua belas indikator keluarga sehat dari setiap keluarga yang besarnya berkisar antara 0 sampai dengan 1 di satu wilayah pada kurun waktu tertentu	Renstra Dinas Kesehatan 2024-2026
Tujuan: Terwujudnya tatakelola Perangkat Daerah yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai hasil evaluasi RB oleh Inspektorat	Renstra Dinas Kesehatan 2024-2026
Sasaran: Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Inspektorat	Renstra Dinas Kesehatan 2024-2026

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan pada Dinas Kesehatan dalam upaya untuk melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan strategi dan arah kebijakan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026. Strategi dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus sesuai dengan strategi urusan kesehatan dalam RPD Kabupaten Kudus yaitu peningkatan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan. Arah kebijakan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus juga sesuai dengan arah kebijakan RPD Kabupaten Kudus, yaitu : 1)peningkatan kualitas Kesehatan ibu; 2)peningkatan kualitas Kesehatan bayi; 3)peningkatan penanganan gizi buruk dan stunting; 4)peningkatan pelayanan Kesehatan pada penderita penyakit menular dan tidak menular; 5)peningkatan pembinaan dan pengawasan hygiene sanitasi TTU, TPM dan institusi; 6)peningkatan mutu fasilitas pelayanan dan 7)peningkatan upaya Kesehatan berbasis masyarakat. Berikut merupakan strategi dan arah kebijakan yang dituangkan dalam dokumen Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026:

Tabel 2.3

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus
Tahun 2023-2026

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan 2. Mendukung pembangunan dan pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan berikut ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan 3. Meningkatkan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu 4. Meningkatkan standarisasi mutu pelayanan kesehatan 5. Meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional
		Peningkatan status kesehatan keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan ibu maternal dan neonatal 2. Meningkatkan pelayanan kesehatan anak balita 3. Mempercepat penurunan dan penanganan balita stunting dan gizi buruk 4. Meningkatkan pelayanan gizi masyarakat 5. Meningkatkan pelayanan kesehatan pada usia produktif dan usia lansia 6. Meningkatkan pelayanan kesehatan lingkungan dan menyelenggarakan kabupaten sehat 7. Meningkatkan pengelolaan kesehatan lingkungan, kerja dan olahraga 8. Memperkuat pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)
		Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan upaya penemuan dan penanganan penyakit menular 2. Meningkatkan deteksi dini dan pengendalian penyakit tidak menular dan Kesehatan jiwa 3. Memperkuat sistem surveilans, kewaspadaan dini dan respon cepat terhadap penyakit yang berpotensi menyebabkan wabah/ Kejadian Luar Biasa (KLB), bencana dan krisis 4. Meningkatkan cakupan imunisasi

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			dasar lengkap
		Pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong partisipasi aktif masyarakat, swasta dan lintas sektor dalam kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) 2. Meningkatkan upaya promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih sehat
		Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan 2. Mendorong pengembangan kualitas dan kompetensi SDM Kesehatan
		Pemenuhan sediaan farmasi, perbekalan kesehatan, alat kesehatan dan makanan minuman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi ketersediaan obat-obatan termasuk vaksin dan perbekalan kesehatan 2. Meningkatkan pembinaan sarana pelayanan kefarmasian, toko alat kesehatan, optikal dan U MOT 3. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Optimalisasi pengelolaan sumberdaya di tingkat Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Pengelolaan SDM berorientasi merit sistem 2. Optimalisasi Pengelolaan sarana prasarana sesuai standar manajemen aset 3. Optimalisasi Pengelolaan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan 4. Optimalisasi Pelaksanaan monitoring evaluasi dan kerja terstandar

2.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024

Dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2024, Dinas Kesehatan melaksanakan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Kudus Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024. Jumlah anggaran Dinas Kesehatan sebesar Rp.222.768.428.591,- dengan komposisi belanja; Program Penunjang Urusan Pemerintahan dan 4 Program Teknis Kesehatan. Adapun besaran anggaran pada tiap program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4.
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikatornya Dinas Kesehatan Tahun 2024

Sasaran		Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan			Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	80,58	
				(kasus)	(11)	
			Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	7,7	
			Angka Kematian Balita (AKBa)	per 1.000 KH	8,41	
			Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Nilai	0,40	
	1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				91,510,020,080
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	
			Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	
			Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	
		Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100		
		Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100		
		Persentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100		
		Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100		

Sasaran		Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)
			Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	
			Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	
			Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	
			Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persen	100	
			Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	per 1.000 penduduk	1.46	
			Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (minimal strata utama)	Persen	100	
			Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100	
			Persentase Desa/ Kelurahan STBM	Persen	50	
			Persentase fasyankes yang melakukan respons KLB/wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tatalaksana kasus)	Persen	100	
	1.2.2.201	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar	Persen	100	20,004,279,090
			Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	Persen	100	
	1.2.2.201.3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	1	1,246,168,400
	1.2.2.201.6	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	7	6,986,037,000

Sasaran		Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)
	1.2.2.201.9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	15	2,932,237,000
	1.2.2.201.14	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	542	808,617,000
	1.2.2.201.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	18	145,962,000
	1.2.2.201.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, BahanHabis Pakai, BahanMedis Habis Pakai,Vaksin, Makanan danMinuman di FasilitasKesehatan yangdisediakan	Paket	22	7,885,257,690
	1.2.2.202	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Cakupan kunjungan Ibu hamil K4</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>70,575,616,670</i>
			<i>Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	
			<i>Cakupan kunjungan bayi</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	
			<i>Cakupan balita ditimbang</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	
			<i>Cakupan penjangkaran pada usia pendidikan dasar</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	
			<i>Prevalensi Balita Gizi Buruk</i>	<i>Persen</i>	<i>0.75</i>	
			<i>Persentase sarana air minum yang diawasi/ diperiksa kualitas air minumannya sesuai standar</i>	<i>Persen</i>	<i>79</i>	
			<i>Persentase Puskesmas yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	
			<i>Persentase puskesmas dengan pelayanan kesehatan yang ramah bagi lanjut usia</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	
			<i>Persentase penderita hipertensi berobat secara teratur</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	
			<i>Cakupan penemuan dan pengobatan penderita Diabetes melitus</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	
		<i>Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>		

Sasaran		Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)
			<i>Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis</i>	<i>Persen</i>	95	
			<i>Persentase cakupan penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA on ART)</i>	<i>Persen</i>	85	
			<i>Persentase puskesmas dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular</i>	<i>Persen</i>	100	
			<i>Persentase kejadian luar biasa (KLB) di desa/ kelurahan ditanggulangi <24 jam</i>	<i>Persen</i>	100	
			<i>Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)</i>	<i>Persen</i>	100	
			<i>Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital</i>	<i>Persen</i>	100	
			<i>Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan</i>	<i>Persen</i>	98	
			<i>Persentase Fasyankes yang memiliki sertifikat akreditasi yang masih berlaku</i>	<i>Persen</i>	100	
	1.2.2.202.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	14,172	159,800,000
	1.2.2.202.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	13,461	65,194,000
	1.2.2.202.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	13,267	297,706,900
	1.2.2.202.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	62,804	97,400,800
	1.2.2.202.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	Orang	151,906	93,000,000
	1.2.2.202.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	283,561	151,312,310
1.2.2.202.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	67,515	20,000,000	

Sasaran		Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)
	1.2.2.202.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	123,318	7,687,000
	1.2.2.202.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	16,956	661,787,000
	1.2.2.202.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	1,617	23,792,840
	1.2.2.202.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	10,969	2,526,761,870
	1.2.2.202.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	17,800	483,059,880
	1.2.2.202.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	52	35,000,000
	1.2.2.202.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	12	7,250,425,250
	1.2.2.202.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	12	187,985,000
	1.2.2.202.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	12	800,929,000
	1.2.2.202.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	12	468,391,000
	1.2.2.202.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	12	195,930,050
	1.2.2.202.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	100	109,216,830
	1.2.2.202.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	156	1,753,038,350
	1.2.2.202.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	12	53,231,410,140
	1.2.2.202.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	50	222,974,950

Sasaran		Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)
	1.2.2.202.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	12	66,621,000
	1.2.2.202.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	12	9,064,000
	1.2.2.202.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	32	301,265,000
	1.2.2.202.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	228	599,500,000
	1.2.2.202.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	52	83,919,500
	1.2.2.202.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	1	447,224,000
	1.2.2.202.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang yang positif Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	818	20,862,000
	1.2.2.202.41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	Jumlah Orang yang Positif Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	1,889	113,040,000
	1.2.2.202.42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah kelompok Orang dengan risiko Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	3,000	3,206,000
	1.2.2.202.46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	12	88,112,000
	1.2.2.203	<i>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</i>	<i>Persentase puskesmas dan rumah sakit yang melaporkan data dan sistem informasi kesehatan</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>486,276,000</i>
	1.2.2.203.2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	10	486,276,000
	1.2.2.204	<i>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi persyaratan perizinan</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>443,848,320</i>

Sasaran		Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)
	1.2.2.204.3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit	39	400,470,320
	1.2.2.204.4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen	11	43,378,000
	1:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuai standar	Persen	100	679,597,000
	1.2.3.202	<i>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>121,811,000</i>
	1.2.3.202.1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	25,000,000
	1.2.3.202.2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	920	40,000,000
	1.2.3.202.3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	12	56,811,000
	1.2.3.203	<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terpenuhi standar kompetensinya</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>557,786,000</i>
	1.2.3.203.1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	160	557,786,000
	1:02:04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman yang sesuai standar	Persen	100	694,285,900
	1.2.4.203	<i>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</i>	<i>Persentase Industri Rumah Tangga yang terdata telah memiliki rekomendasi produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>391,121,050</i>

Sasaran		Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)
	1.2.4.203.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	60	391,121,050
	1.2.4.204	<i>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</i>	<i>Persentase penyedia Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang terdata dengan rekomendasi Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>72,968,850</i>
	1.2.4.204.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	12	72,968,850
	1.2.4.205	<i>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</i>	<i>Persentase penyedia makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang terdata dan dilakukan pembinaan</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>49,682,000</i>
	1.2.4.205.1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dokumen	12	49,682,000
	1.2.4.206	<i>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</i>	<i>Persentase produk makanan dan minuman PIRT yang diperiksa dan memenuhi syarat keamanan pangan</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>180,514,000</i>
	1.2.4.206.1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	70	180,514,000
	1:02:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	81.25	913,667,500
	1.2.5.201	<i>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase Desa/ Kelurahan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>397,337,700</i>
	1.2.5.201.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	12	397,337,700

Sasaran		Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)
	1.2.5.202	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rumah tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persen	80.0	350,000,000
	1.2.5.202.1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	12	350,000,000
	1.2.5.203	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Posyandu aktif	Persen	85.7	166,329,800
	1.2.5.203.1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	12	166,329,800
			Indeks Reformasi Birokrasi PD	Nilai	33.55	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah			Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Niai	92.93	
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	41	128,970,858,111
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah	Persen	100	634,737,590
	1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	35	429,093,090
	1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	32	205,644,500
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/ DPPA	Persen	80,0	123,999,817,015
	1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	10,221	123,853,288,715
	1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	107,704,000
	1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		38,824,300

Sasaran		Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	Persen	42.86	262,351,200
	1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	30	262,351,200
	1.02.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	Persen	100	522,503,200
	1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	17,502,000
	1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	264,563,000
	1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	37,736,000
	1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	80,856,000
	1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	28,172,200
	1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	4,200,000
	1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	89,474,000
	1.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	Persen	100	1,969,822,676
	1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3,150,000
	1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	472,743,676
	1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	92,926,000

Sasaran		Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Anggaran (Rp.)
	1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13	1,401,003,000
	1.02.01.2.09.	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase BMD dalam kondisi baik</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>1,581,626,430</i>
	1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	33	408,570,500
	1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	50	1,173,055,930
TOTAL						222,768,428,591

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun tujuan perjanjian kinerja sebagai berikut:

1. Wujud nyata komitmen, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Dasar penilaian keberhasilan/kegagalan, penghargaan dan sanksi;
4. Dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi; dan
5. Dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

Berikut perjanjian kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2024:

Tabel 2.5

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target 2024
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 Kelahiran Hidup	80,58
		Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 Kelahiran Hidup	7,70
		Angka Kematian Balita (AKBa)	per 1.000 Kelahiran Hidup	8,41
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Nilai	0,40
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	92,93

Untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan program dan anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.6

Program dan Anggaran untuk Mendukung Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran	Sumber Anggaran
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 91.510.020.080	- Dana Alokasi Umum (DAU) - Pajak Rokok - DBHCHT - DAK Fisik - DAK Non Fisik (BOK)
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 679.597.000	- Pajak Rokok - Dana Alokasi Umum (DAU) - DAK Non Fisik
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp. 694.285.900	- DAK Non Fisik (BOK) - DAK Non Fisik (POM) - Pajak rokok
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 913.667.500	- DAK Non Fisik (BOK) - Dana Alokasi Umum (DAU) - Pajak rokok
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 128.970.858.111	- Dana Alokasi Umum (DAU) - Pajak rokok

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan dimaksud untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang.

Dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisien dengan cara membandingkan antara output dan input baik rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisien yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Kemudian dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dan hasil, manfaat atau dampak. selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya perbedaan maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa dalam mewujudkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan/ditentukan beberapa program dengan beberapa kegiatan operasionalnya melalui penerapan indikator kinerja. Untuk lebih jelas dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Adapun pengukuran kinerja mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja

sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval	Kriteria Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus memiliki sasaran strategis bidang kesehatan, yaitu meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dengan indikator: Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKBa). Serta sasaran strategis penunjang, yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator: nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah. Adapun capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2023	Tahun 2024			Kriteria	Target Akhir Renstra
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 Kelahiran Hidup	82,67	80,58	32,75	159,35%	Sangat tinggi	80
		Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 Kelahiran Hidup	7,82	7,70	6,7	112,98%	Sangat tinggi	7
		Angka Kematian Balita (AKBa)	per 1.000 Kelahiran Hidup	9,5	8,41	8,1	104,63%	Sangat tinggi	7,5
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Nilai	0,6	0,40	0,72	180%	Sangat tinggi	0,5
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	58,60	92,93	66,69	72,09%	Sedang	93,93

Tahun 2024 hasil capaian kinerja sasaran strategis 1 (urusan kesehatan) yaitu AKI, AKB, AKBa dan IKS melebihi dari target yang telah ditetapkan, dan tingkat capaian meningkat jika dibandingkan capaian tahun 2023. Sedangkan hasil capaian kinerja sasaran 2 (urusan

penunjang) yaitu nilai SAKIP tidak mencapai target tapi meningkat dibandingkan capaian tahun 2023.

3.2. Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan

a. Capaian Tahun 2024

1) Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah jumlah kematian wanita yang terjadi selama proses kehamilan atau dalam waktu 42 hari setelah melahirkan. Kematian ibu adalah hasil dari risiko yang dihadapi ibu-ibu selama kehamilan dan kelahiran, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk status gizi ibu, kondisi sosial ekonomi, kondisi kesehatan yang buruk menjelang kehamilan, jumlah komplikasi kehamilan dan kelahiran, dan ketersediaan dan pemanfaatan layanan kesehatan, termasuk perawatan prenatal dan obstetri. Angka Kematian Ibu (AKI) dihitung melalui jumlah kematian maternal di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah dalam 1 tahun dikalikan 100.000. Untuk menekan Angka Kematian Ibu (AKI), diperlukan kesamaan persepsi dan pengertian dari semua pihak mengenai pentingnya dan peran berbagai aspek dalam penanganan masalah kematian ibu sehingga strategi untuk mengatasinya berupa integrasi menyeluruh semua pihak.

Angka Kematian Ibu (AKI) mengalami kenaikan tingkat capaian dibandingkan tahun 2023 sebesar 111,07%, dari 61,48% menjadi 172,55% dan memperoleh predikat sangat tinggi.

2) Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi setelah kelahiran sampai bayi belum berusia satu tahun. AKB juga didefinisikan sebagai jumlah kematian bayi di bawah satu tahun per 1.000 kelahiran hidup. Kematian bayi adalah kematian yang terjadi karena kecelakaan, bencana, cedera, atau bunuh diri yang terjadi pada bayi usia 0 hingga 11 bulan, termasuk neonatal. Angka Kematian Bayi (AKB) dihitung melalui jumlah kematian bayi di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah dalam 1 tahun dikalikan 1.000. Nilai normatif AKB adalah sebagai berikut: >70 sangat tinggi, 40-70 tinggi, 20-39 sedang, dan <20 rendah.

Angka Kematian Bayi (AKB) mengalami kenaikan target tahun dari 6,90 menjadi 7,70. Dengan persentase realisasi yang naik sebesar 22,62% dari 107,25% menjadi 129,87% dan memperoleh predikat sangat tinggi.

3) Angka Kematian Balita (AKBa)

Angka Kematian Balita (AKBa) adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun (atau 0-59 bulan) pada tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun yang sama. Indikator ini sangat terkait dengan tujuan kelangsungan hidup anak, yang mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan anak, termasuk kesehatan mereka. Tingkat masalah kesehatan balita, tingkat pelayanan KIA/Posyandu, tingkat keberhasilan program KIA/Posyandu, dan kondisi sanitasi lingkungan digambarkan oleh AKBa. Angka Kematian Balita (AKBa) dihitung melalui jumlah penduduk yang meninggal pada umur 0-4 tahun (0-59 bulan) pada waktu tertentu dibagi jumlah penduduk usia 0-4 tahun (0-59 bulan) pada pertengahan tahun yang sama dikalikan 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Balita (AKBa) pada tahun 2024 sebesar 8,1%, dengan tingkat capaian sebesar 104,63%.

4) Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Indeks Keluarga Sehat (IKS) perhitungannya diambil dari rekapitulasi data 12 indikator yang diambil datanya dan hasilnya dibagi menjadi 3 dari setiap keluarga di satu wilayah pada kurun waktu tertentu dengan nilai skala 0 - 1, yaitu : 1) Keluarga Sehat, bila IKS > 0,800; 2) Keluarga Pra Sehat, bila IKS = 0,500 - 0,800; 3) Keluarga Tidak Sehat, bila IKS < 0,500 adapun 12 indikator keluarga sehat terdiri dari : keluarga yang mengikuti keluarga berencana, persalinan di fasilitas kesehatan, bayi mendapat imunisasi dasar lengkap, bayi mendapat ASI eksklusif, pertumbuhan balita dipantau, penderita TB paru berobat sesuai standard, penderita hipertensi berobat teratur, penderita gangguan jiwa tidak ditelantarkan dan diobati, anggota keluarga tidak ada yang merokok, keluarga sudah menjadi anggota JKN, keluarga mempunyai saran air bersih dan keluarga menggunakan jamban sehat.

Berdasarkan hasil pendataan keluarga sehat kabupaten kudas perhitungan Indeks Keluarga Sehat dari 12 indikator keluarga sehat yang dilaksanakan di 19 wilayah kerja puskesmas menunjukkan nilai IKS sebesar 0,72 artinya status kesehatan masyarakat kudas dikategorikan pra sehat. Angka tersebut meningkat dibandingkan capaian tahun 2023. Peningkatan capaian tersebut dikarenakan peran aktif kader dan petugas untuk melakukan survei secara optimal, koordinasi lintas sektoral, pemberdayaan masyarakat sehingga mampu menjangkau target secara keseluruhan serta adanya komitmen bersama menjadikan kudas kabupaten sehat.

b. Perbandingan dengan Capaian Tahun 2023

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa capaian kinerja indikator sasaran 1 terkait dengan angka kematian ibu, bayi dan balita serta Indeks Keluarga Sehat meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, terutama kematian ibu terjadi penurunan kasus yang cukup signifikan. Indeks Keluarga Sehat meskipun ada peningkatan capaian, namun masih termasuk dalam kriteria keluarga pra sehat.

c. Perbandingan dengan Akhir Periode Renstra

Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2024-2026, capaian kinerja tahun 2024 untuk angka kematian ibu dan bayi menunjukkan peningkatan capaian kinerja, namun masih perlu upaya lagi untuk penurunan angka kematian balita karena tahun 2024 angka kematian balita masih lebih tinggi dibandingkan target akhir tahun Renstra. Lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator	Target Akhir Tahun	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	80	32,75	244,27%
	Angka Kematian Bayi (AKB)	7	6,7	104,48%
	Angka Kematian Balita (AKBa)	7,5	8,1	86,101%
	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,5	0,72	144%

2. Sasaran 2 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
Indikator : Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah

a. Capaian Tahun 2024

Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah diperoleh dari nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Tim AKIP Inspektorat. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2024, Target SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2024 sebesar 92,93 dan memperoleh realisasi nilai 66,99 dengan predikat "B" dengan capaian 72,09%. Hal tersebut menunjukkan bahwa

implementasi akuntabilitas kinerja "Baik", yaitu implementasi AKIP sudah baik.

b. Perbandingan dengan Capaian Tahun 2023

Berdasarkan laporan hasil evaluasi tahun 2023 realisasinya 58,60 dengan capaian kinerja 64,40%, menurun dibanding tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2024 meningkat namun masih di bawah target, dengan realisasi nilai SAKIP sebesar 66,99 dengan capaian kinerja 72,09%.

c. Perbandingan dengan Akhir Periode Renstra

Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra Tahun 2024-2026, capaian kinerja tahun 2024 untuk indikator nilai SAKIP menunjukkan masih lebih rendah dibanding target akhir Renstra Tahun 2024-2026, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator	Target Akhir Tahun	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	93,93	66,69	71%

Tingkat capaian sasaran 1 dan sasaran 2 didukung oleh program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan capaian sebesar 98,08% (sangat tinggi) berikut:

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD)	41 Nilai	39	95,12
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
		Persentase Capaian kinerja subkegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	89,36	89,36
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35 Dokumen	35	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32 Laporan	32	100
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	80 persen	90,1	112,63
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10221 Orang/bulan	16337	120
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12	100
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	63 Dokumen	63	100
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
		Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	42,86 persen	99,2	120
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75 Orang	75	100
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
		Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	100 Persen	100	100
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	100
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12	100
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3	100
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1	100
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2	100
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	49	98
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	100 persen	100	100
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	6	100
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4	100
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Laporan	8	100
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13	100
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		Persentase BMD dalam kondisi baik	100 persen	100	100
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				

NO.	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	33	100
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	49	98
37258	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
		Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 Persen	99,08	99,08
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100 Persen	95,93	95,93
		Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 Persen	100	100
		Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 Persen	100	100
		Persentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 Persen	95,98	95,98
		Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 Persen	99,86	99,86
		Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 Persen	100	100
		Persentase rumah sakit rujukan yang terakreditasi minimal strata utama	100 Persen	100	100
		Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100 Persen	100	100
		Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	1,46 per 1.000 penduduk	1,06	72,6
		Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	86,2 Persen	99,27	115,16
		Persentase sarana prasarana sesuai standar (RSUD)	100 Persen	100	100
		Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang	100 Persen	99,86	99,86

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
		mendapatkan pelayanan kesehatan			
		Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 Persen	100	100
		Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 Persen	100	100
		Persentase Desa/ Kelurahan STBM	50 Persen	52,27	104,54
		Persentase fasyankes yang melakukan respons KLB/ wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tatalaksana kasus)	100 Persen	100	100
		Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 Persen	99,62	99,62
1.02.02.2.01	<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>				
		Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	100 Persen	95	95
		Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	100 Persen	100	100
		Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar	100 Persen	100	100
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya				
		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	1	100
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas				
		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	7 Unit	7	100
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas				
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	6 Unit	5	83,33
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	10	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	96 Unit	96	100
1.02.02.2.01.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	22 Paket	22	100
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
		Persentase penderita hipertensi berobat secara teratur	100 Persen	100	100
		Cakupan balita ditimbang	100 Persen	100	100
		Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100 Persen	95	95
		Cakupan kunjungan bayi	100 Persen	95	95
		Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	100 Persen	95	95
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis	95 Persen	102	107,37
		Cakupan penemuan dan pengobatan penderita Diabetes melitus	100 Persen	100	100
		Cakupan penjangkauan pada usia pendidikan dasar	100 Persen	100	100
		Persentase cakupan penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA on ART)	100 Persen	80	80
		Persentase Fasyankes yang memiliki sertifikat akreditasi yang masih berlaku	100 Persen	100	100
		Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital	100 Persen	100	100
		Persentase kejadian luar biasa (KLB) di desa/ kelurahan ditangulangi <24 jam	100 Persen	100	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
		<i>Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan</i>	98 Persen	99,05	101,07
		<i>Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>	100 Persen	100	100
		<i>Persentase puskesmas dengan pelayanan kesehatan yang ramah bagi lanjut usia</i>	100 Persen	100	100
		<i>Persentase puskesmas dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular</i>	100 Persen	100	100
		<i>Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA</i>	100 Persen	100	100
		<i>Persentase Puskesmas yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM</i>	100 Persen	100	100
		<i>Persentase sarana air minum yang diawasi/ diperiksa kualitas air</i>	79 Persen	88,12	111,54
		<i>minumnya sesuai standar</i>			
		<i>Prevalensi Balita Gizi Buruk</i>	100 Persen	100	100
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14172 Orang	11705	82,59
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13461 Orang	11214	83,31
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13267 Orang	13200	99,49
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	62804 Orang	62800	99,99
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	138475 Orang	138475	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	283561 Orang	283561	100
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	67515 Orang	67000	99,24
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	123318 Orang	123318	100
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16956 Orang	16956	100
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1617 Orang	1617	100
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10969 Orang	17339	120
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	17800 Orang	12915	72,56
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	52 Dokumen	52	100
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				

NO.	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12	100
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12	100
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	31 Dokumen	31	100
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12	100
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12	100
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA				
		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	100	100
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	156 Dokumen	156	100
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12	100
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional				
		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	50 Paket	50	100
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	12 Dokumen	12	100
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota				
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	32 Unit	32	100
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				
		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	228 Laporan	228	100
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	52 Dokumen	52	100
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				
		Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	1	100
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	818 Orang	2503	120
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1889 Orang	17162	120
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	3000 Orang	3000	100
1.02.02.2.02.46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12	100
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi				

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
		<i>Persentase puskesmas dan rumah sakit yang melaporkan data dan sistem informasi kesehatan</i>	100 Persen	75	75
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	10 Dokumen	10	100
1.02.02.2.04	<i>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>				
		<i>Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi persyaratan perizinan</i>	100 Persen	100	100
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	39 Unit	39	100
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	11 Dokumen	11	100
37623	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
		<i>Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuai standar</i>	100 Persen	80	80
1.02.03.2.02	<i>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</i>				
		<i>Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar</i>	100 Persen	70	70
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				
		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar				
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	920 Orang	725	78,8
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen	10	83,33
1.02.03.2.03	<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>				
		<i>Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terpenuhi standar kompetensinya</i>	100 persen	80	80
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	160 Orang	157	98,13
37988	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				
		Persentase sarana kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman yang sesuai standar	100 Persen	100	100
1.02.04.2.03	<i>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</i>				
		<i>Persentase Industri Rumah Tangga yang terdata telah memiliki rekomendasi produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT</i>	100 persen	80	80

NO.	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	180 Dokumen	150	83,33
1.02.04.2.04	<i>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</i>				
		<i>Persentase penyedia Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang terdata dengan rekomendasi Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)</i>	100 persen	100	100
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	12 Dokumen	12	100
1.02.04.2.05	<i>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</i>				
		<i>Persentase penyedia makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang terdata dan dilakukan pembinaan</i>	100 persen	100	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	12 Dokumen	12	100
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				
		Presentase produk makanan dan minuman PIRT yang diperiksa dan memenuhi syarat keamanan pangan	100 Persen	80	80
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan				
		Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	95 Unit	84	88,42
38354	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				
		Cakupan Desa Siaga Aktif	81,25 Persen	81,25	100
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
		Persentase Desa/ Kelurahan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	100 persen	100	100
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	12	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
		Persentase rumah tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	80 persen	80	100
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	12 Dokumen	12	100
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
		Persentase Posyandu aktif	84 persen	84	100
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12	100
Rata - rata capaian kinerja (%)				98,08	
Predikat Kinerja				Sangat Tinggi	

❖ Faktor pendorong:

Tercapainya target kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus tidak terlepas dari beberapa faktor pendorong sebagai berikut:

- a) perbaikan kualitas layanan kesehatan melalui penambahan jumlah Fasyankes, pemenuhan sarana prasarana di Fasyankes dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK);
- b) peningkatan upaya promosi kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit;
- c) Komitmen petugas dan tenaga kesehatan dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah disusun bersama guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
- d) Dukungan anggaran terhadap upaya peningkatan kesehatan masyarakat.

❖ Faktor Penghambat:

belum optimalnya pelibatan lintas sektor selain urusan kesehatan dalam mendukung dan berpartisipasi terutama

dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular.

❖ Alternatif Pemecahan Masalah

- a) peningkatan promosi kesehatan terutama terkait kesehatan ibu dan anak;
- b) peningkatan penyediaan fasilitas dan kualitas layanan kesehatan terutama bagi ibu dan anak baik di FKTP maupun FKTRL.

3.3. Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran strategis disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6 menunjukkan program yang mendukung pada sasaran 1 terdapat efisiensi anggaran sebesar 4,36%, sedangkan pada program yang mendukung sasaran 1 sebesar 0,07%.

Tabel 3.6

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Program

No.	Sasaran Strategis	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Persentase Capaian	Efisiensi
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			91.510.020.080	86.635.816.746	94,67 %	4,36 %
			Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 Persen		99,08	99,08 %	
			Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100 Persen		95,93	95,93 %	
			Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 Persen		100,00	100,00 %	
			Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 Persen		100,00	100,00 %	
			Persentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 Persen		95,98	95,98 %	
			Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 Persen		99,86	99,86 %	

No.	Sasaran Strategis	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Persentase Capaian	Efisiensi
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 Persen		100,00	100,00 %	
			Persentase rumah sakit rujukan yang terakreditasi minimal strata utama	100 Persen		100,00	100,00 %	
			Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100 Persen		100,00	100,00 %	
			Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	1,46 per 1.000 penduduk		1,06	72,60 %	
			Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	86,2 Persen		99,27	115,16 %	
			Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 Persen		99,86	99,86 %	
			Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 Persen		100,00	100,00 %	
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 Persen		100,00	100,00 %	
			Persentase Desa/ Kelurahan STBM	50 Persen		52,27	104,54 %	
			Persentase fasyankes yang melakukan respons KLB/wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tatalaksana kasus)	100 Persen		100,00	100,00 %	
			Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 Persen		99,62	99,62 %	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			679.597.000	560.174.449	82,43 %	-2,43 %
			Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuai standar	100 Persen		80,00	80,00 %	
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALATKESEHATAN DANMAKANAN MINUMAN			694.285.900	454.297.150	65,43 %	34,57 %

No.	Sasaran Strategis	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Persentase Capaian	Efisiensi
			Persentase sarana kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman yang sesuai standar	100 Persen		100,00	100,00 %	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			913.667.500	749.612.542	82,04 %	17,96 %
			Cakupan Desa Siaga Aktif	81,25 Persen		81,25	100,00 %	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			128.970.858.111	122.587.538.924	95,05 %	0,07 %
			Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD)	41 Nilai		39,00	95,12 %	

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran dan Kinerja pada Aplikasi e-planning.kudus.kab

Sedangkan efisiensi anggaran berdasarkan kegiatan dan subkegiatan dapat dilihat pada tabel 3.7 dan 3.8.

Tabel 3.7
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Kegiatan

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/ Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			20.004.279.090	18.051.146.210	90,24 %	8,10 %
			Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	100 Persen		95,00	95,00 %	
			Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	100 Persen		100,00	100,00 %	
			Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar	100 Persen		100,00	100,00 %	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			70.575.616.670	67.815.751.600	96,09 %	2,16 %
			Persentase penderita hipertensi berobat secara teratur	100 Persen		100,00	100,00 %	
			Cakupan balita ditimbang	100 Persen		100,00	100,00 %	
			Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100 Persen		95,00	95,00 %	

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/ Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Cakupan kunjungan bayi	100 Persen		95,00	95,00 %	
			Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	100 Persen		95,00	95,00 %	
			Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis	95 Persen		102,00	100,00 %	
			Cakupan penemuan dan pengobatan penderita Diabetes melitus	100 Persen		100,00	100,00 %	
			Cakupan penjarangan pada usia pendidikan dasar	100 Persen		100,00	100,00 %	
			Persentase cakupan penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA on ART)	100 Persen		80,00	80,00 %	
			Persentase Fasyankes yang memiliki sertifikat akreditasi yang masih berlaku	100 Persen		100,00	100,00 %	
			Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital	100 Persen		100,00	100,00 %	
			Persentase kejadian luar biasa (KLB) di desa/ kelurahan ditangulangi <24 jam	100 Persen		100,00	100,00 %	
			Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	98 Persen		99,05	100,00 %	
			Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100 Persen		100,00	100,00 %	
			Persentase puskesmas dengan pelayanan kesehatan yang ramah bagi lanjut usia	100 Persen		100,00	100,00 %	
			Persentase puskesmas dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular	100 Persen		100,00	100,00 %	
			Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	100 Persen		100,00	100,00 %	
			Persentase Puskesmas yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM	100 Persen		100,00	100,00 %	
			Persentase sarana air minum yang diawasi/ diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	79 Persen		88,12	100,00 %	
			Prevalensi Balita Gizi Buruk	100 Persen		100,00	100,00 %	
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			486.276.000	431.713.324	88,78 %	-13,78 %
			Persentase puskesmas dan rumah sakit yang melaporkan data dan sistem informasi kesehatan	100 Persen		75,00	75,00 %	
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			443.848.320	337.205.612	75,97 %	24,03 %

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/ Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi persyaratan perizinan	100 Persen		100,00	100,00 %	
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			121.811.000	63.216.449	51,90 %	18,10 %
			Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100 Persen		70,00	70,00 %	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			557.786.000	496.958.000	89,09 %	-9,09 %
			Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	100 persen		80,00	80,00 %	
			Kabupaten/Kota yang terpenuhi standar kompetensinya					
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			391.121.050	225.209.600	57,58 %	22,42 %
			Persentase Industri Rumah Tangga yang terdata telah memiliki rekomendasi produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT	100 persen		80,00	80,00 %	
		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			72.968.850	68.955.000	94,50 %	5,50 %
			Persentase penyedia Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang terdata dengan rekomendasi Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	100 persen		100,00	100,00 %	
		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			49.682.000	46.126.550	92,84 %	7,16 %
			Persentase penyedia makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang terdata dan dilakukan pembinaan	100 persen		100,00	100,00 %	

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/ Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			180.514.000	114.006.000	63,16 %	-23,16 %
			Persentase produk makanan dan minuman PIRT yang diperiksa dan memenuhi syarat keamanan pangan	100 Persen		80,00	80,00 %	
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			397.337.700	342.045.542	86,08 %	13,92 %
			Persentase Desa/ Kelurahan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	100 persen		100,00	100,00 %	
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			350.000.000	308.167.000	88,05 %	11,95 %
			Persentase rumah tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	80 persen		80,00	100,00 %	
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			166.329.800	99.400.000	59,76 %	40,24 %
			Persentase Posyandu aktif	84 persen		84,00	100,00 %	
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			634.737.590	580.673.413	91,48 %	-2,12 %
			Persentase Capaian kinerja subkegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen		89,36	89,36 %	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			123.999.817.015	117.913.985.524	95,09 %	4,91 %
			Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	80 persen		90,10	100,00 %	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			262.351.200	260.249.000	99,20 %	0,80 %
			Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	42,86 persen		99,20	100,00 %	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			522.503.200	472.407.524	90,41 %	9,59 %
			Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	100 Persen		100,00	100,00 %	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.969.822.676	1.841.437.577	93,48 %	6,52 %
			Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	100 persen		100,00	100,00 %	

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/ Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.581.626.430	1.518.785.886	96,03 %	3,97 %
			Persentase BMD dalam kondisi baik	100 persen		100,00	100,00 %	

Tabel 3.8
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Sub Kegiatan pada Dinas Kesehatan
Kabupatebn Kudus Tahun 2024

No	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/ Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Pengembangan Puskesmas			6.986.037.000	6.892.000.350	0,9865	0,0135
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	7 Unit		7	1	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			2.932.237.000	2.485.807.554	0,8478	-0,0144
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	6 Unit		5	0,8333	
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik			808.617.000	792.926.750	0,9806	0,0194
		Fasilitas Pelayanan Kesehatan						
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit		10	1	
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			145.962.000	107.694.800	0,7378	0,2622
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	96 Unit		96	1	
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			7.885.257.690	6.807.029.838	0,8633	0,1367

No	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/ Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	22 Paket		22	1	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			159.800.000	134.663.186	0,8427	-0,0168
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14172 Orang		11705	0,8259	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			65.194.000	55980500	0,8587	-0,0256
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13461 Orang		11214	0,8331	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			297.706.900	287.996.002	0,9674	0,0276
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13267 Orang		13200	0,9949	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			97.400.800	84556643	0,8681	0,1318
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	62804 Orang		62800	0,9999	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			93.000.000	68.867.000	0,7405	0,2595
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	138475 Orang		138475	1	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			151.312.310	146.371.450	0,9673	0,0327
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	283561 Orang		283561	1	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			20.000.000	19.857.000	0,9929	-0,0005
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	67515 Orang		67000	0,9924	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			7.687.000	7.686.800	1	0
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan	123318 Orang		123318	1	
			Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			661.787.000	631.186.900	0,9538	0,0462

No	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/ Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16956 Orang		16956	1	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			23.792.840	23.792.800	1	0
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1617 Orang		1617	1	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			2.526.761.870	2.454.199.500	0,9713	0,0287
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10969 Orang		17339	1	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			483.059.880	464.921.000	0,9625	-23,69 %
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	17800 Orang		12915	0,7256	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			35.000.000	7.978.250	0,228	0,7721
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	52 Dokumen		52	1	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			7.250.425.250	7.012.148.350	0,9671	0,0329
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12	1	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			187.985.000	160.304.400	0,8528	0,1472
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen		12	1	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			800.929.000	766498026	0,957	0,043
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	31 Dokumen		31	1	
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			468.391.000	398392500	0,8506	0,1494
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen		12	1	

No	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/ Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan			195.930.050	154040000	0,7862	0,2138
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12	1	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			109.216.830	106105950	0,9715	0,0285
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang		100	1	
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1.753.038.350	1531594192	0,8737	0,1263
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	156 Dokumen		156	1	
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			53.231.410.140	51679586920	0,9708	0,0292
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen		12	1	
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			222.974.950	119637905	0,5366	0,4634
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	50 Paket		50	1	
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			66.621.000	54080976	0,8118	0,1882
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	12 Dokumen		12	1	
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			9.064.000	4182000	0,4614	0,5386
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen		12	1	
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota			301.265.000	228546000	0,7586	0,2414
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	32 Unit		32	1	
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			599.500.000	549634500	0,9168	0,0832
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	228 Laporan		228	1	

No	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/ Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			83.919.500	62752750	0,7478	0,2522
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	52 Dokumen		52	1	
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			447.224.000	394167100	0,8814	0,1186
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit		1	1	
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			20.862.000	18736000	0,8981	0,1019
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	818 Orang		2503	1	
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			113.040.000	113040000	1	0
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1889 Orang		17162	1	
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			3.206.000	1855000	0,5786	0,4214
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	3000 Orang		3000	1	
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			88.112.000	72392000	0,8216	0,1784
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12	1	
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			486.276.000	431713324	0,8878	0,1122
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	10 Dokumen		10	1	
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			400.470.320	296508330	0,7404	0,2596
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	39 Unit		39	1	
		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan			43.378.000	40697282	0,9382	0,0618

No	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/ Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	11 Dokumen		11	1	
		Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan			25.000.000	21159000	0,8464	0,1536
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen		1	1	
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			40.000.000	13790949	0,3448	0,4433
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	920 Orang		725	0,788	
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			56.811.000	28266500	0,4976	0,3358
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen		10	0,8333	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			557.786.000	496958000	0,8909	0,0903
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	160 Orang		157	0,9813	
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			391.121.050	225209600	0,5758	0,2575
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	180 Dokumen		150	0,8333	

No	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/ Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			72.968.850	68955000	0,945	0,055
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	12 Dokumen		12	1	
		Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			49.682.000	46126550	0,9284	0,0716
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	12 Dokumen		12	1	
		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan			180.514.000	114006000	0,6316	0,2526
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	95 Unit		84	0,8842	
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			397.337.700	342045542	0,8608	0,1392
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen		12	1	
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			350.000.000	308167000	0,8805	0,1195
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	12 Dokumen		12	1	

No	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/ Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			166.329.800	99400000	0,5976	0,4024
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		12	1	
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			429.093.090	390.965.413	0,9111	0,0889
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35 Dokumen		35	1	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			205.644.500	189.708.000	0,9225	0,0775
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32 Laporan		32	1	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			123.853.288.715	117.777.945.624	0,9509	0,0491
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10221 Orang/bulan		16337	1	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			107.704.000	104.627.000	0,9714	0,0286
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12	1	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			38.824.300	31.412.900	0,8091	0,1909
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	63 Dokumen		63	1	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			262.351.200	260.249.000	0,992	0,008
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75 Orang		75	1	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			17.502.000	17.492.500	0,9995	0,0005
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1	1	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			264.563.000	251.307.850	0,9499	0,0501

No	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/ Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12	1	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			37.736.000	37.714.000	0,9994	0,0006
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2	1	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			80.856.000	62.157.000	0,7687	0,2313
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3	1	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			28.172.200	20.158.000	0,7155	0,2845
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1	1	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.200.000	4.200.000	1	0
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2	1	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			89.474.000	79.378.174	0,8872	0,0928
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan		49	0,98	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.150.000	3.000.000	0,9524	0,0476
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan		6	1	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			472.743.676	414.436.893	0,8767	0,1233
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4	1	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			92.926.000	63.616.000	0,6846	0,3154
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Laporan		8	1	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.401.003.000	1.360.384.684	0,971	0,029
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13	1	

No	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/ Kinerja Bulan Desember Tahun 2024	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			408.570.500	382.754.001	0,9368	0,0632
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit		33	1	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.173.055.930	1.136.031.885	0,9684	0,0116
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit		49	0,98	
		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya			1.246.168.400	965.686.918	0,7749	0,2251
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit		1	1	

3.4. Inovasi dan Penghargaan

1. Inovasi

Dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan meningkatkan capaian kinerja Dinas Kesehatan, terdapat inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan pada tahun 2024, yaitu:

- a. Si Cantik (Aksi Cegah Anak Stunting dengan Intervensi Kolaboratif)

Si Cantik merupakan upaya percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas dengan melibatkan unsur pemerintah, swasta, akademisi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, melalui intervensi kolaboratif yang tepat sasaran dan tepat guna dengan mendekatkan akses layanan ke masyarakat.

Strategi “Si Cantik” telah dilaksanakan di semua wilayah Kabupaten Kudus melalui pelaksanaan Kelas “Si Cantik” untuk pemberian intervensi spesifik dan sensitive, pendampingan sasaran oleh kader, serta kampanye perubahan perilaku dengan Gerakan “Info Minggu Cantik” melalui semua media sosial.

Hasil implementasi menunjukkan bahwa pada akhir tahun 2024 terjadi penurunan kasus stunting dibandingkan pada tahun sebelumnya. Balita stunting mengalami kenaikan status gizi, serta balita bermasalah gizi lain mengalami perbaikan sehingga dapat dicegah munculnya kasus stunting baru.

- b. SBN (Sekolah Bebas Nyamuk): Kolaborasi Penggerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) sebagai Pengendalian Infeksi Dengue di Kabupaten Kudus

(SBN) Sekolah Bebas Nyamuk bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan angka kematian infeksi dengue, serta minimalisasi penggunaan fogging yang tidak sesuai SOP melalui penggerakan PSN 3M Plus sejak dini. Program Sekolah Bebas Nyamuk menysasar anak usia sekolah baik SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK di Kabupaten Kudus. Anak usia sekolah (5-14 tahun) merupakan kelompok yang rentan terserang infeksi dengue. Selain itu, anak sekolah merupakan *agent of change* di masa depan.

Program SBN merupakan Solusi yang inovatif dengan memanfaatkan siswa sebagai Siswa Pemantau Jentik (Simantik) untuk memonitor keberadaan jentik di lingkungan sekolah. Inovasi ini menonjol karena mengedepankan partisipasi anak sekolah yang berperan sebagai agen perubahan. Inovasi SBN telah menunjukkan signifikansi dalam efisiensi anggaran hingga 124,9 juta dengan mengurangi frekuensi fogging yang tidak efektif serta berhasil menurunkan angka kesakitan dengue hingga 55,14% pada tahun 2024.

2. Penghargaan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi dan penghargaan yang dicapai pada tahun 2024. Adapun prestasi dan penghargaan tersebut sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Penghargaan dan Prestasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus
Tahun 2024

NO.	TANGGAL/ TAHUN	LEVEL	NAMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	KETERANGAN
1	17 Mei 2024	Nasional	Champion ASIK Peringkat ke-4 Se-Indonesia	Kementerian Kesehatan	an. Rochyani, Amd, Keb. Puskesmas Gribig
2	9 Agustus 2024	Nasional	UHC AWARDS-Kategori Madya Pencapaian UHC 2024	Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	an. Kabupaten Kudus
3	19 Agustus 2024	Nasional	Pengelolaan Program TBC Terbaik II	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Dinas Kesehatan
4	27 Agustus 2024	Provinsi	Juara III Pos Pelayanan Terpadu Berprestasi	Gubernur Jawa Tengah	an. Posyandu Kaliwuluh 1

NO.	TANGGAL/ TAHUN	LEVEL	NAMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	KETERANGAN
5	17 September 2024	Nasional	PENANGGULANGAN AIDS – TUBERKULOSIS – MALARIA (ATM) 2024	Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES)	
6	14 November 2024	Nasional	PELAYANAN PUBLIK ZONA HIJAU	OMBUDSMAN	Dinas Kesehatan
7	2 Desember 2024	Nasional	Pengelolaan Program TBC Terbaik II	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan
8	6 Desember 2024	Provinsi	pengelolaan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2ML) Terbaik II	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Dinas Kesehatan
9	11 Desember 2024	Nasional	Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB)	an. UPTD Puskesmas Kaliwungu dan UPTD Puskesmas Rejosari
10	12 Desember 2024	Kabupaten	Peringkat ke-2 dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik pada Inovasi "Sekolah Bebas Nyamuk (SBN)"	Pemerintah Kabupaten Kudus	Dinas Kesehatan

BAB IV

PENUTUP

Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggungjawab teknis pembangunan Kesehatan di Kabupaten Kudus, menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan mengarah pada sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus tahun 2024-2026.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan pencapaian target sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Capaian kinerja tersebut dijabarkan dalam indikator kinerja yang diuraikan dari sasaran yang ada.

4.1. Kesimpulan

1. Tahun 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus menetapkan sebanyak 2 sasaran dengan 5 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Sasaran 1: meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang terdiri Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBa) dan Indeks Keluarga Sehat (IKS) menunjukkan capaian kinerja di atas target (lebih dari 100%);
 - b. Sasaran 2: meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dengan indikator nilai SAKIP menunjukkan tingkat capaian sebesar 72,09% (tidak mencapai target).
2. Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.222.768.428.591,-, sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.211.069.252.160,-. Dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 94,75%, dengan efisiensi anggaran pada program yang mendukung sasaran 1 sebesar 4,36% dan sasaran 2 sebesar 0,07%.
3. Faktor pendorong keberhasilan capaian indikator kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus diantaranya adalah akses pelayanan kesehatan yang mudah di wilayah serta aktifnya promosi kesehatan baik secara langsung maupun melalui siaran radio dan sosial media.

4. Faktor penghambat tercapainya indikator kinerja terutama Indeks Keluarga Sehat (IKS) dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan adalah belum optimalnya pelibatan lintas sektor selain urusan kesehatan dalam mendukung dan berpartisipasi terutama dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular.

4.2. Langkah Perbaikan Kinerja

Dalam upaya peningkatan capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus upaya yang harus dilakukan:

1. Optimalisasi standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagaimana Permenkes RI Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
2. Optimalisasi Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga untuk peningkatan capaian target menjadi kategori keluarga sehat, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
3. Penguatan fasilitas pelayanan kesehatan primer berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Peningkatan upaya preventif dan promotif untuk mencapai perilaku masyarakat hidup sehat;
5. Meningkatkan koordinasi dengan sektor terkait, lembaga swadaya masyarakat peduli kesehatan, organisasi profesi, organisasi masyarakat, dan swasta dalam peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2024, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Kudus.

Kudus, 20 Januari 2025
KEPALA DINAS KESEHATAN

dr. ANDINI ARIDEWI, M.Kes
Pembina Tk. I
NIP. 19731008 200501 2 009

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS KESEHATAN

Jl Diponegoro no 15 Kode Pos 59311
Telp 438152 Fax 435030

email : dinkes@kuduskab.go.id Website : dinkes.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. ANDINI ARIDEWI, M.Kes
Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : Dr. M. HASAN CHABIBIE, S.T., M.Si.
Jabatan : Pj. BUPATI KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. M. HASAN CHABIBIE, S.T., M.Si.

15 Januari 2024
Pihak Pertama,

dr. ANDINI ARIDEWI, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 197310082005012009

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KUDUS**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,40 Nilai
	Angka Kematian Ibu (AKI)	80,58 per 100.000 kh
	Angka Kematian Bayi (AKB)	7,70 per 1.000 kh
	Angka Kematian Balita (AKBa)	8,41 per 1.000 kh
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	92,93 Nilai

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	87.969.624.396	
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	72.769.270.680	
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	679.597.000	
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	706.569.900	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	863.667.500	
TOTAL		162.988.729.476	


 Pj. BUPATI KUDUS,
 Dr. M. HASAN CHABIBIE, S.T., M.Si.

15 Januari 2024
 Kepala Dinas Kesehatan,

 dr. ANDINI ARIDEWI, M.Kes
 Pembina Tingkat I
 NIP. 197310082005012009



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DINAS KESEHATAN

Jl Diponegoro no 15 Kode Pos 59311

Telp 438152 Fax 435030

email : dinkes@kuduskab.go.id Website : dinkes.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. ANDINI ARIDEWI, M.Kes

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : Dr. M. HASAN CHABIBIE, S.T., M.Si.

Jabatan : Pj. BUPATI KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Dr. M. HASAN CHABIBIE, S.T., M.Si.

Kudus, 30 Agustus 2024

Pihak Pertama,

dr. ANDINI ARIDEWI, M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 197310082005012009

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KUDUS**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Balita (AKBa)	8,41 per 1.000 kh
	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,40 Nilai
	Angka Kematian Ibu (AKI)	80,58 per 100.000 kh
	Angka Kematian Bayi (AKB)	7,70 per 1.000 kh
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	92,93 Nilai

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	128.970.858.111	
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	91.510.020.080	
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	679.597.000	
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	694.285.900	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	913.667.500	
TOTAL		222.768.428.591	



Kudus, 30 Agustus 2024
KEPALA DINAS KESEHATAN,

dr. ANDINI ARIDEWI, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 197310082005012009



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Mejobo Nomor 35 Telp. 437124
KUDUS

NOMOR : 700.1.2.1/1385/2024
SIFAT : -
LAMPIRAN : 1 (satu) bendel
PERIHAL : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Perangkat Daerah

Kudus, 18 Juli 2024
Kepada :
Yth. Kepala Perangkat Daerah
se- Kab. Kudus
di -
KUDUS

Bersama ini dengan hormat kami kirimkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) Perangkat Daerah Tahun 2024 (hasil diskusi panel) sebagaimana terlampir. Terkait rekomendasi yang ada dalam LHE perangkat daerah ini, agar dapat dilakukan pemantauan internal atas tindak lanjutnya secara berkala (tiga bulan sekali).

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS INSPEKTORAT DAERAH

Komplek Perkantoran Jl. Mejobo No. 35 Kudus Kode Pos 59316

Telp. (0291) 437124 Faks. (0291) 437124

Email : inspektorat@kuduskab.go.id Website : inspektorat.kuduskab.go.id

Nomor : 700.1.2/1196/2024
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus
Tahun 2024

Kudus, 28 Juni 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus
di Kudus

Dengan hormat kami sampaikan hasil evaluasi AKIP pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus tahun 2024 sebagai berikut:

A. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. Pelaksanaan evaluasi tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*)**. Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

B. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi evaluasi AKIP tahun sebelumnya.

C. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus menunjukkan nilai 66,99 dengan predikat "B". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "baik", yaitu implementasi AKIP sudah baik, terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan serta komitmen dalam manajemen kinerja.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	17,70	18,62
2	Pengukuran Kinerja	30	16,80	19,74
3	Pelaporan Kinerja	15	10,05	11,13
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	12,25	17,50
	Nilai Hasil Evaluasi	100	56,80	66,99
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	B

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja

Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus telah menyusun dokumen perencanaan kinerja berupa Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Aksi (Renaksi), Perjanjian Kinerja (PK), dan dokumen lainnya. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus telah selaras dengan Keputusan Bupati Nomor 000.8.6.3/8/2024 tanggal 11 Januari 2024 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja, yaitu hasil analisis kinerja sebelumnya belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja.

2. Pengukuran Kinerja

Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus telah melakukan pengukuran realisasi kinerja dan rencana aksi secara berkala. Untuk mendukung pelaksanaan pengukuran kinerja tersebut telah dilakukan *desk* oleh Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kudus untuk membahas evaluasi kinerja dan realisasi anggaran. Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus telah menggunakan aplikasi manajemen kinerja yaitu *e-planning* yang sudah terintegrasi dari aspek perencanaan, pengukuran, hingga realisasi anggaran. Pengukuran indikator kinerja dan realisasi anggaran sudah tercantum hingga sub kegiatan dan digunakan dalam monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap bulan oleh pimpinan. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja, yaitu pemantauan terhadap capaian kinerja belum sepenuhnya diikuti dengan penyesuaian rencana aksi kinerja yang dinamis.

3. Pelaporan Kinerja

Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2023 dan telah dipublikasikan melalui *website* perangkat daerah. Laporan akuntabilitas kinerja tersebut telah menyajikan informasi capaian kinerja dan analisis ketercapaian kinerja. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja antara lain:

- a. Laporan akuntabilitas kinerja yang disusun belum dilakukan *reviu* secara berjenjang dan belum sepenuhnya menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level kabupaten/provinsi/nasional (*benchmark* kinerja) secara memadai.
- b. Informasi dalam laporan akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penentuan penyesuaian anggaran dan strategi pelaksanaan program/kegiatan dalam mencapai target kinerja.
- c. Masih terdapat ruang perbaikan untuk lebih menajamkan laporan akuntabilitas kinerja untuk mendorong perbaikan dan penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus telah melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil evaluasi implementasi SAKIP tahun sebelumnya. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilaksanakan oleh tim evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal, antara lain:

- a. Pemantauan atas tindak lanjut hasil evaluasi AKIP belum dilaksanakan secara berkala dan rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP belum sepenuhnya ditindaklanjuti.
- b. Masih terdapat ruang perbaikan untuk lebih meningkatkan capaian nilai efisiensi dan efektivitas kinerja program dan kegiatan serta capaian kinerja *output* dan *outcome*.

D. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas, dan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja berdasarkan hasil analisis perbaikan kinerja/rekomendasi evaluasi capaian kinerja sebelumnya.
2. Melakukan penyesuaian rencana aksi kinerja berdasarkan rekomendasi hasil pemantauan dan pengendalian secara berkala atas kinerja yang tidak sesuai dengan target untuk disepakati bersama oleh pemberi rekomendasi dan penerima rekomendasi melalui dialog kinerja.
3.
 - a. Melakukan *reviu* berjenjang terhadap dokumen laporan akuntabilitas kinerja dan menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level kabupaten/provinsi/nasional (*benchmark* kinerja) dalam laporan akuntabilitas kinerja secara memadai.
 - b. Memastikan laporan akuntabilitas kinerja telah dimanfaatkan dalam penentuan besaran anggaran dan penyesuaian strategi pelaksanaan program/kegiatan dalam upaya mencapai target kinerja.
 - c. Berkomitmen dalam memanfaatkan laporan akuntabilitas kinerja sebagai pedoman untuk mendorong perbaikan dan penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

4. a. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil evaluasi AKIP secara berkala (triwulan) dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP.
- b. Berkomitmen dalam memanfaatkan hasil evaluasi AKIP sebagai pedoman untuk meningkatkan capaian nilai efisiensi dan efektivitas kinerja program dan kegiatan serta capaian kinerja *output* dan *outcome*.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. Kami mengharapkan agar Saudara dan seluruh jajaran dapat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan serta menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



TEMBUSAN: Kepada Yth.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus.

DOKUMENTASI KEGIATAN



Pertemuan Audit Kematian Ibu dan Anak



Pertemuan Tim Pengkaji AMP



Menerima Kaji Banding Upaya Penurunan AKI, AKB dan Stunting dari Dinas Kesehatan Kotawaringin Timur



Orientasi Kader Lansia



Skrining Penyakit Menular dan Tidak Menular



Skrining Tuberkulosis



Launching Desa Siaga Tuberkulosis



Penyegaran Guru UKS/ Madrasah



Bimtek Keamanan Pangan



Bimtek Pelaku Usaha Industri Rumah
Tangga

PENGHARGAAN DAN INOVASI



Champion ASIK Peringkat ke-4 Se-Indonesia



UHC AWARDS-Kategori Madya Pencapaian
UHC 2024



Juara III Pos Pelayanan Terpadu Berprestasi



PENANGGULANGAN AIDS – TUBERKULOSIS – MALARIA (ATM) 2024



PELAYANAN PUBLIK ZONA HIJAU



Pengelolaan Program TBC Terbaik II



pengelolaan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2ML) Terbaik II



Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

INOVASI SI CANTIK



Upaya Percepatan Penurunan Stunting melalui Aksi Cegah Anak Stunting dengan Intervensi Kolaboratif (SI CANTIK) di Kabupaten Kudus



IMPLEMENTASI



Kelas CANTIK di setiap UPTD Puskesmas sebagai Intervensi Medis bagi Balita dengan masalah gizi

Pendampingan kasus balita dengan masalah gizi & Perubahan perilaku sebagai upaya edukasi pencegahan masalah gizi & stunting.

Pemberian PMT susu dan telur (PKMK, PDK dan PMT Lokal)